

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Kajian Empiris

2.1.1 Pengertian Sistem Dan Prosedur

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Winarno; 2006: 8). Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto ; 2008: 34). Menurut Mulyadi sitem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi; 2005:5)

Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian sistem dan prosedur, yaitu :

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu *input*, proses dan *output*. (Widjajanto, 2001:1)

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. (Mulyadi, 2001:5)

Dalam buku “Sistem Informasi Akuntansi” karangan Baridwan. Terdapat beberapa macam definisi sistem,antara lain :

Menurut Moscove, pengertian sistem adalah sebagai berikut :

“Sistem adalah suatu *entity* (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.” (Baridwan, 2008:2)

Murdick memberikan pengertian sistem sebagai berikut :

“Sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang dijadikan satu untuk tujuan umum.” (Baridwan, 2008:2)

Sedangkan pengertian sistem menurut Baridwan sebagai berikut:

“Sistem adalah suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh (terintegrasi) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.” (Baridwan, 2008:2)

Dari berbagai definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan susunan elemen-elemen yang membentuk jaringan prosedur dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, prosedur adalah tuntutan proses yang harus diberikan dalam menjalankan proses sistem tersebut dengan melibatkan beberapa dari pilihan yang ada untuk menjamin keseragaman di setiap transaksi perusahaan.

Sedangkan untuk definisi prosedur sendiri menurut beberapa ahli, yaitu :

Prosedur adalah merupakan urutan-urutan pekerjaan kerani (*Clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. (Baridwan, 2008:3)

Prosedur merupakan urutan klerikal yang terdiri dari menulis, menggandakan, menghitung member kode, mendaftar, memilih, memindah, dan membandingkan (Romney 2006: 9).

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan berulang-ulang. (Mulyadi, 2006:6)

Pada intinya, kedua definisi prosedur diatas adalah sama. Yaitu susunan dari kegiatan yang telah tersistematis dengan baik yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai satu kesatuan sistem kerja untuk setiap transaksi perusahaan yang selalu terjadi.

Dengan dikaitkannya efektifitas pada sistem dan prosedur, untuk itu perlu juga dibahas secara singkat mengenai efektifitas menurut Darajam dan Anthony (2002 : 114). Efektifitas adalah perbandingan antara *output* yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek.

Menurut Agoes (2004:1), pendekatan audit yang biasa dilakukan dalam suatu *management* audit adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari setiap fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Program dapat tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan tanpa memedulikan biaya yang dikeluarkan, maka hal tersebut disebut efektif.

Menurut Kartikahadi dalam Agoes (2004:9), pengertian efektivitas yaitu efektivitas dimaksudkan bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi

telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan.

Efektivitas menurut Agoes (2004:9), efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (*volume*) hasil kerja, kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan.

Menurut Cook dan Winkle dalam Agoes (2004:9) *effectivity, if the achieved benefits are in accordance with the program's preestablished goals.*

Menurut Arens *et al.* (2010:824): *effectiveness* berarti tercapainya tujuan, seperti menghasilkan produk tanpa cacat.

Semakin besar kontribusi *output* (keluaran) yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tersebut maka dapat dikatakan semakin efektif pada unit tersebut. Pada kebanyakan pusat tanggung jawab, pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar biaya yang telah ditetapkan yaitu gambaran tentang biaya tertentu yang dapat menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.

2.2 Sistem Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur *formal* dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna (Hall, 2007: 9). Sistem Informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai (Bodnar, 2006). Sistem Informasi berbasis komputer

merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat.

Pengertian pengendalian intern menurut Widjajanto (2005 : 18) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut :

Pengendalian Intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang ditetapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk:

- 1) Mengamankan aktiva perusahaan
- 2) Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi
- 3) Meningkatkan efisiensi
- 4) Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi

Menurut Niswonger *et al* (2009:183) dalam bukunya “Accounting”, pengendalian internal (*internal control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Sistem pengendalian intern dapat mempunyai beberapa pengertian dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian pengendalian intern sama dengan pengertian *internal check* yaitu pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (*crossfooting*) maupun penjumlahan menurun (*footing*), yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi.

Dalam arti luas, pengendalian intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan

manajemen untuk mengadakan pengendalian. Sistem Pengendalian Intern dapat dipandang sebagai sistem sosial (*socialsystem*) yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk: (a) melindungi harta; (b) menjamin terhadap terjadinya utang yang tidak layak"; (c) menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi; (d) dapat diperolehnya operasi secara efisien; (e) menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) memberikan pengertian pengendalian intern dalam arti yang luas yang dikutip oleh Hartadi (2009:3) dalam bukunya *Sistem Pengendalian Intern*" adalah sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan”.

Struktur pengendalian intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik yang dikutip oleh Agoes (2006 : 57) dalam bukunya “*Auditing*” adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai.

Pengertian lain tentang sistem pengendalian intern menurut Mulyadi dan Kanaka (2008 : 171 -172) dalam bukunya "*Auditing*" adalah sebagai berikut :

Sistem pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris; manajemen dan *personel lairt* yang didesain untuk memberikan kelayakan memadai tentang, pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengertian diatas mengandung arti sebagai berikut :

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Artinya menjadi alat mencapai tujuan yang terdiri dari rangkaian tindakan dan menyatu dalam infrastruktur lembaga/perusahaan.
2. Pengendalian intern dipengaruhi orang. Hal ini tidak hanya menyangkut pedoman kebijakan dan formulir, tetapi orang-orang pada setiap level organisasi termasuk dewan direksi, manajemen dan lainnya.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan memberi jaminan yang beralasan (*rational*), bukan jaminan mutlak (*absolute*), karena ada batasan-batasan yang melekat pada sistem pengendalian intern dan perlunya *cost* dan *benefit* adanya pengendalian.
4. Pengendalian menjadikan penggerak pencapaian tujuan dalam (*overlapping*) laporan keuangan, kesesuaian, dan operasi.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern dalam arti luas dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengendalian administrasi dan pengendalian intern bidang akuntansi.

1. Pengendalian Administrasi

Pengendalian ini meliputi (dan tidak terbatas pada) rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah kepada tindakan manajemen untuk menyetujui atau memberi wewenang. Pemberian wewenang merupakan fungsi manajemen yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan merupakan titik awal untuk menciptakan pengendalian akuntansi.

Dalam sistem pengendalian administrasi ada dua unsur yang mempengaruhi :

- a. Sistem rencana organisasi yang merupakan tulang punggung (sarana) sistem pengendalian intern, karena proses pengambilan keputusan yang menuju ke sistem pemberian wewenang (*authorization*) untuk melaksanakan transaksi akan banyak dipengaruhi oleh rencana organisasi.
- b. Sistem-sistem yang bersifat usaha memperoleh efisiensi dan mencapai tujuan ketaatan kepada kebijaksanaan pimpinan yang tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan.

2. Pengendalian Intern Bidang Akuntansi

Meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan dirancang untuk meyakinkan:

- a. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan/wewenang manajemen, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Transaksi dicatat agar memudahkan :
 - Penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut.

- Mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva
- c. Penggunaan atas harta/aktiva diberikan hanya dengan persetujuan manajemen.
- d. Jumlah aktiva seperti yang ada pada laporan/catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan tindakan yang tepat.

Ada tiga elemen yang berkaitan dengan pengendalian akuntansi yaitu pengamanan harta/aktiva, dapat dipercayainya catatan keuangan, dan transaksi-transaksi.

Ada empat konsep dasar yang secara *implisit* ada dalam pengendalian akuntansi yaitu :

1. Tanggung jawab manajemen.
2. Jaminan yang beralasan.
3. Pembatasan-pembatasan.
4. Metode pengolahan data.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern dalam arti luas menurut AICPA yang diterjemahkan oleh Widjanto (2005:234) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern (*internal control*) memiliki dua fungsi utama, yaitu :

- (1). Mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi.
- (3). Mendorong efisiensi operasi organisasi sehingga kebijaksanaan ataupun tujuan manajemen yang telah digariskan dapat tercapai.

Pengendalian Intern mempunyai tujuan sebagai berikut :

(1). Mengamankan harta perusahaan dan catatan organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Demikian pula halnya dengan aktiva *non fisik* seperti piutang usaha, dokumen-dokumen penting, dan catatan kegiatan perusahaan (seperti buku besar dan jurnal).

(2). Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan.

(3). Meningkatkan efisiensi

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan, dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

(4). Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan

jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

Tujuan pengendalian internal lain menurut Mulyadi dan Puradiredja (2008:172) adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu : (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar bahwa :

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha.
2. Informasi bisnis akurat.
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.

(Niswonger et al, 2009:184).

2.2.3 Ciri-ciri Pokok Pengendalian Internal

Empat ciri yang merupakan syarat wajib suatu perusahaan dalam pengendalian yang baik, yaitu :

- 1) Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
- 2) Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik dan berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta aktiva, utang, pendapatan, dan biaya.
- 3) Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas dan fungsi setiap bagian dalam organisasi.
- 4) Suatu tingkat kecakapan karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.2.4 Unsur Struktur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi dan Kanaka (2008:175) dalam bukunya “*Auditing*”, struktur pengendalian intern terdiri dari lima unsur pokok, yaitu :

(1). Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran *personel* organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

- Nilai integritas dan etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Dewan komisaris dan *komite* audit
- Filosofi dan gaya operasi manajemen
- Struktur organisasi
- Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

(2). Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain *implementasi* aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat *minimum*, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

(3). Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua *personel* yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi.

(4). Aktivitas Pengendalian

Adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

(5) Pemantauan

Adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh *personel* yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, pada tahap *desain* maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang

diharapkan, dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

Menurut Arens dan Loebbecke, unsur-unsur pengendalian intern yang baik itu harus meliputi.

a. Pemisahan tugas yang cukup

Empat pedoman dalam pemisahan tugas untuk mencegah salah saji, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja :

- (1).Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi.
- (2). Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan.
- (3). Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan
- (4). Pemisahan tugas dalam pengolahan data elektronik.

b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas kalau pengendalian ingin memuaskan. Karena kalau setiap orang dalam organisasi dapat memperoleh atau menggunakan aktiva kehendak hati, maka kekacauan akan terjadi. Otorisasi dapat berbentuk :

(1). Otorisasi umum

Berarti bahwa *manajer* menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Bawahan diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum ini dengan cara menyetujui seluruh transaksi

dalam batas yang ditentukan kebijakan, Contoh otorisasi umum adalah penerbitan daftar harga pasti untuk penjualan barang; batasan kredit untuk pelanggan.

(2). Otorisasi khusus

Otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi *individual*. *Manajer* sering kali tidak dapat menyusun kebijakan umum otorisasi untuk beberapa transaksi. Sebagai gantinya lebih disukai untuk membuat otorisasi khusus berdasarkan kasus demi kasus. Misalnya otorisasi transaksi penjualan oleh manajer penjualan atas mobil perusahaan yang telah dipakai.

c. Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi ke seluruh bagian organisasi, *klien* dan antara organisasi yang berbeda: Dokumen harus memadai untuk memberi keyakinan memadai bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar. Dokumen dan catatan sebaiknya :

- (1) Berseri dan diberi penomoran untuk memungkinkan pengendalian atas hilangnya dokumen.
- (2) Disiapkan pada saat transaksi terjadi, atau segera sesudahnya.
- (3) Cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan dapat dimengerti dengan jelas.

(4) Dirancang sedapat mungkin untuk multi guna, sehingga meminimalkan bentuk, dokumen, dan catatan yang berbeda-beda.

(5) Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar.

d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Contohnya adalah kotak tahan api dan kotak deposit untuk melindungi aktiva seperti uang tunai dan efek-efek merupakan perlindungan fisik lain yang penting.

e. Pengecekan *independent* atas pelaksanaan

Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan berkali-kali dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain, yang seringkali disebut sebagai pengecekan *independen* atau *verifikasi intern*. Kebutuhan pengecekan *independent* meningkat karena Struktur Pengendalian Intern cenderung untuk berubah setiap saat jika tidak terdapat mekanisme penelaahan yang sering. Pegawai mungkin lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, atau menjadi sembrono kalau tidak ada orang yang meninjau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Selain itu, salah saji yang sengaja maupun yang tidak sengaja mungkin saja terjadi, tanpa melihat kualitas pengendalian.

2.2.5 Elemen-Elemen Struktur Pengendalian Intern

Menurut Arens dan Loebbecke, struktur pengendalian intern mencakup lima kategori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima kategori ini disebut sebagai komponen sistem pengendalian intern yang terdiri dari :

(1). Lingkungan Pengendalian

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut.

(2). Penetapan Risiko Manajemen

Penetapan risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang *relevan* terhadap penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(3). Sistem Akuntansi dan Informasi

Kegunaan sistem akuntansi suatu satuan usaha adalah untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi satu satuan usaha dan untuk mengelola (tanggung gugat) atas aktiva terkait.

(4). Prosedur-prosedur Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain dari empat komponen yang lain, yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya.

(5). Pemantauan

Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektivitas rancangan dan operasi sistem pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai keadaan.

Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood, struktur pengendalian internal perusahaan terdiri dari tiga elemen yaitu :

- (1) Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan, atau memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu.
- (2) Sistem akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang berkaitan.
- (3) Prosedur-prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang tercakup dalam lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang harus ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dapat dicapai.

- (4) Akses ke aktiva hanya diperbolehkan dengan otorisasi manajemen.
- (5) Pertanggungjawaban tercatat mengenai aktiva dibandingkan dengan aktiva yang ada dengan interval yang memadai dan tindakan yang tepat diambil sesuai dengan setiap perbedaan yang terjadi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sistem pengendalian intern dapat mempunyai beberapa pengertian dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian pengendalian intern sama dengan pengertian *internal check* yaitu pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (*crossfooting*) maupun penjumlahan menurun (*footing*), yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi.

Dalam arti luas, pengendalian intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengendalian. Sistem Pengendalian Intem dapat dipandang sebagai sistem sosial (*Socialsystem*) yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk: (a) melindungi harta; (b) menjamin terhadap terjadinya utang yang tidak layak"; (c) menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi; (d) dapat diperolehnya operasi secara efisien; (e) menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

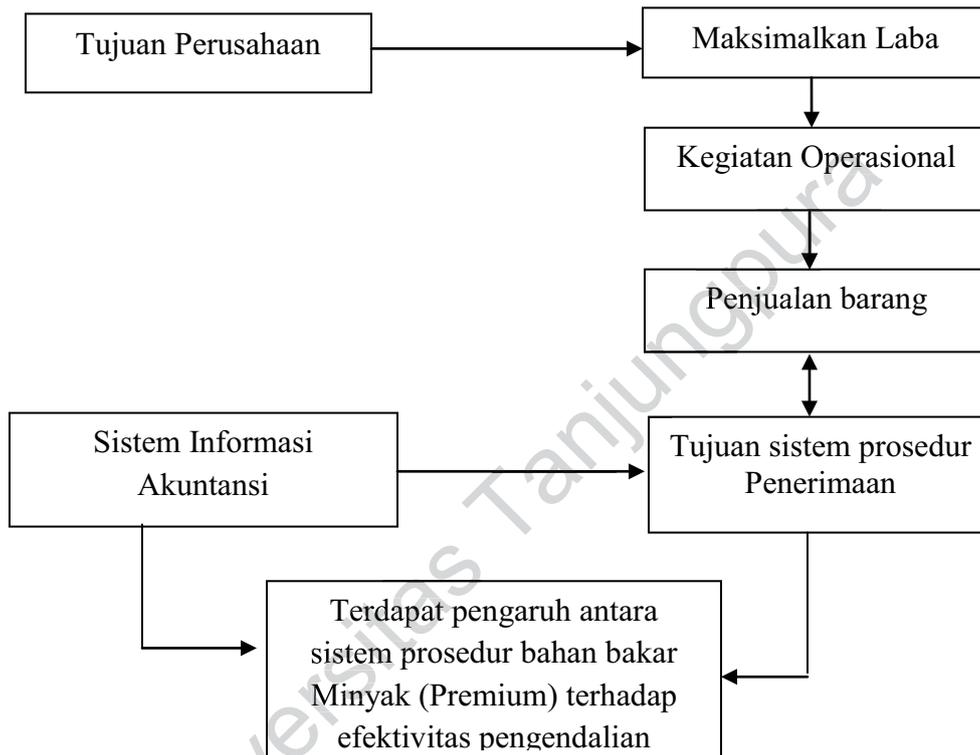
Untuk lebih jelasnya penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai sistem Sistem dan Prosedur Atas Penerimaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

1. Bangun (2006) melakukan penelitian tentang Pengawasan Intern Atas Penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Agrianusa Indojoya Medan tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan intern kas bukan hanya salah satu unsur pokok internal perusahaan tetap juga merupakan pos yang penting dalam laporan keuangan perusahaan agar target perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu dengan adanya pengawasan intern kas pada PT. Agrianus Indijaya Medan dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan kas dalam perusahaan yang dapat dipergunakan untuk hal-hal yang tidak layak dan tidak tepat.
2. Nababan (2008) melakukan penelitian tentang Analisa penerimaan dan pengeluaran kas dan kaitannya dengan Pengawasan Intern pada PT. Golden Dragon Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan terhadap kas yang disusun sebaiknya dapat diperhitungkan benar-benar oleh bagian seksi anggaran untuk setiap departemen dengan belajar atau melihat dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya agar resiko terhadap selisih anggaran dan realisasi yang terlalu besar dapat dihindari khususnya perencanaan dalam kas perusahaan.

Dari uraian diatas dapat dilihat sistem pengendalian intern dalam SPBU untuk mengetahui apakah aktivitas SPBU telah sesuai dengan sistem dan

prosedur yang diberlakukan oleh PERTAMINA merupakan kerangka berpikir yang dijadikan landasan berpikir ilmiah.

Berdasarkan uraian kerangka di atas, maka peneliti dapat menggambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran